

PENDEKATAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA PALEMBANG (STUDI PADA BAPPEDA LITBANG KOTA PALEMBANG)

T. Safriansyah¹⁾; Dian Anggraini²⁾

¹⁾²⁾Universitas Sriwijaya
Palembang Indonesia

Email: ¹⁾ tsafriansyah04@gmail.com; ²⁾ diananggraini@fisip.unsri.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [16 Mei 2026]
Revised [18 Juni 2026]
Accepted [20 Juli 2026]

KEYWORDS

Pendekatan Dynamic,
Governance,
Pembangunan Litbang

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan di Kota Palembang menghadapi tantangan belum optimalnya tata kelola yang dinamis dan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan dynamic governance yang dilakukan Bappeda Litbang Kota Palembang menggunakan teori Neo dan Chen yang mencakup kemampuan berpikir utama, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Litbang telah menerapkan pendekatan dynamic governance secara cukup baik. Kemampuan *thinking ahead* tercermin pada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi serta pemanfaatan sistem pengumpulan data terintegrasi dan kerangka Satu Data Indonesia. Kemampuan *thinking again* diwujudkan melalui mekanisme evaluasi berkala triwulan, tahunan, dan per periode yang diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan.

ABSTRACT

Governance in Palembang City faces challenges regarding the suboptimal implementation of dynamic and collaborative governance in development planning. This study aims to analyze the dynamic governance approach carried out by the Bappeda Litbang of Palembang City using Neo and Chen's framework, which encompasses three core thinking capabilities, that is *thinking ahead*, *thinking again*, and *thinking across*. A qualitative descriptive method was employed, with data gathered through triangulation techniques, including participant observation, in depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that Bappeda Litbang has implemented dynamic governance approach fairly well. The *thinking ahead* capability is reflected in the formulation of long-term development plans aligned with national and provincial policies, as well as the utilization of integrated data systems and the Satu Data Indonesia framework. The *thinking again* capability is manifested through periodic evaluation mechanisms conducted quarterly, annually, and per planning period which are integrated into development planning documents. Meanwhile, *thinking across* is evident in cross agency coordination and broad stakeholder engagement through various forums. Nevertheless, the coordination process still encounters constraints regarding the consistent attendance of authorized decision-makers in coordination forums.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Budiyanto et al. (2025) mendefinisikan tata kelola pemerintahan (*governance*) sebagai konsep yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Senada dengan hal tersebut, Anggraini (2025) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi dasar dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks yang semakin dinamis, pemerintah juga dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan efektif terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis (Kamila et al., 2025). Kondisi ini mendorong lahirnya pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh Neo & Chen (2007), yang menekankan pentingnya kemampuan birokrasi untuk beradaptasi, belajar, dan berinovasi secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip *dynamic governance* secara implisit tercermin dalam perkembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia yang terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Undang (2024) menjelaskan bahwa sejak tahun 1945, sistem tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami sembilan kali perubahan regulasi, dengan regulasi terakhir berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, sehingga berupaya menyesuaikan sistem tata kelola pemerintahan agar tetap relevan. Selain itu, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya integrasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pembangunan, menurut Afandi & Muftiadi (2023), merupakan proses multidimensional yang mencakup transformasi sosial, kelembagaan, dan ekonomi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial yang berkembang (Nurhayati et al., 2024). Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan pembangunan melalui sistem perencanaan yang terarah dan terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses penentuan arah kebijakan pembangunan yang disusun secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan visi pembangunan nasional ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, sekaligus melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini menetapkan arah pembangunan yang difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan pendidikan dan pariwisata, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi hijau, serta pemerataan pembangunan.

Arah kebijakan tersebut tercermin dalam pernyataan Gubernur Sumatera Selatan pada forum Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, yang menegaskan komitmen pemerintah provinsi melalui pelaksanaan 12 program strategis pembangunan. Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan melayani (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2025). Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berorientasi pada pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi tidak terlepas dari kontribusi dan kinerja pembangunan di tingkat kabupaten/kota, salah satunya Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Dengan luas wilayah 352,51 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.801.367 jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025), Kota Palembang menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk pemerataan pembangunan antara wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Kondisi ini menuntut pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan yang responsif, berkelanjutan, dan inovatif.

Keberhasilan pembangunan Kota Palembang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan secara adaptif dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan konsep *dynamic governance* yang menekankan kemampuan berpikir adaptif dalam birokrasi (Neo & Chen, 2007). Pemerintah Kota Palembang sendiri telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palembang Tahun 2025–2045, yaitu “Palembang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Inovasi dan Kolaborasi,” dengan salah satu misi utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang memiliki peran strategis sebagai institusi perencana yang mengoordinasikan pembangunan daerah. Proses perencanaan pembangunan di Kota Palembang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Meskipun indikator pembangunan menunjukkan tren positif, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang mengindikasikan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, pendekatan *dynamic governance* menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada Bappeda Litbang Kota Palembang. Telaah pustaka menunjukkan bahwa penelitian mengenai *dynamic governance* masih lebih banyak berfokus pada implementasi pembangunan, bukan pada proses perencanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendekatan *dynamic governance* yang dilakukan Bappeda Litbang dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

LANDASAN TEORI

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika lingkungan strategis, konsep *governance* berkembang menjadi *dynamic governance*. Boon dan Geraldine dalam Gaba et al. (2024) mendefinisikan *dynamic governance* sebagai kemampuan sistem pemerintahan untuk menyesuaikan kebijakan, institusi, dan struktur agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan. Rivki dalam Iriani et al. (2025) menekankan bahwa *dynamic governance* menuntut fleksibilitas, adaptasi, dan integrasi lintas sektor dalam tata kelola modern. Konsep ini diperkaya oleh Neo & Chen (2007) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang dinamis bertumpu pada tiga kemampuan berpikir utama, yaitu *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (berpikir kembali), dan *thinking across* (berpikir lintas batas). Ketiga kemampuan tersebut memungkinkan birokrasi untuk terus belajar, mengevaluasi kebijakan, dan berkolaborasi dalam merespons perubahan (Anggraini et al., 2025).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, perencanaan dipahami sebagai proses sistematis untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Siagian dalam Jauhariyah & Syamsudin (2023) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai upaya merumuskan langkah-langkah masa depan dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada. Perencanaan pembangunan yang efektif menuntut kemampuan adaptif dan reflektif agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *dynamic governance* menjadi kerangka konseptual yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada Bappeda Litbang Kota Palembang, karena mampu menjelaskan bagaimana lembaga perencana berpikir visioner, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok (Creswell & David Creswell, 2018). Sumber data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang berperan dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Kiareni et al. (2024) adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam hal ini adalah pihak-pihak di Bappeda Litbang serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan *stakeholders* yang berperan dalam perencanaan pembangunan Kota Palembang. Informan dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu *key informants* (informan kunci) dan informan pendukung. *Key informants* merupakan pihak internal dari Bappeda Litbang Kota Palembang, yang memiliki peran langsung dalam proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi perencanaan pembangunan daerah. *Key informants* terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kota Palembang serta Pejabat Fungsional di bidang yang sama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi, yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik dan sumber data yang tersedia meliputi observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan kerangka *dynamic governance* oleh Neo & Chen (2007), yang menekankan kemampuan pemerintah untuk berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir kembali (*thinking again*), dan berpikir lintas sektor (*thinking across*) dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa tata kelola yang adaptif tidak hanya berbicara tentang kemampuan merespons perubahan, tetapi juga kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan masa depan, melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah berjalan, dan membangun sinergi lintas aktor.

Thinking Ahead (berpikir ke depan)

Penerapan pendekatan *dynamic governance* dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang pada tahap *thinking ahead* tercermin melalui perencanaan jangka panjang, kemampuan mengidentifikasi tantangan masa depan, serta pemanfaatan data strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Litbang Kota Palembang telah menerapkan perencanaan jangka panjang secara sistematis, selaras, dan berjenjang dengan kebijakan nasional dan provinsi. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang Tahun 2025–2045 dilakukan melalui koordinasi lintas level pemerintahan, konsultasi publik, serta penyesuaian terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi. Hal tersebut ditegaskan oleh A A selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kota Palembang yang menyatakan bahwa, “RPJPD Kota Palembang 2025–2045 sudah disusun dan ditetapkan melalui Perda, dengan tetap mengacu pada delapan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi, meskipun Kota Palembang menetapkan lima misi yang mencakup keseluruhan agenda nasional” (Wawancara, 19 November 2025).

Temuan ini diperkuat oleh E S selaku Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda yang menjelaskan bahwa penyelarasan kebijakan dilakukan melalui forum konsultasi publik, sosialisasi dari pemerintah pusat, serta koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi. Menurutnya, “Tema nasional, provinsi, dan kota selalu dikaitkan agar nyambung dan saling mendukung, sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dengan prioritas nasional” (Wawancara, 19 November 2025). Hasil observasi penulis terhadap Dokumen RPJPD Kota Palembang Tahun 2025–2045 menunjukkan bahwa perencanaan jangka panjang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, yang mencerminkan perencanaan komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

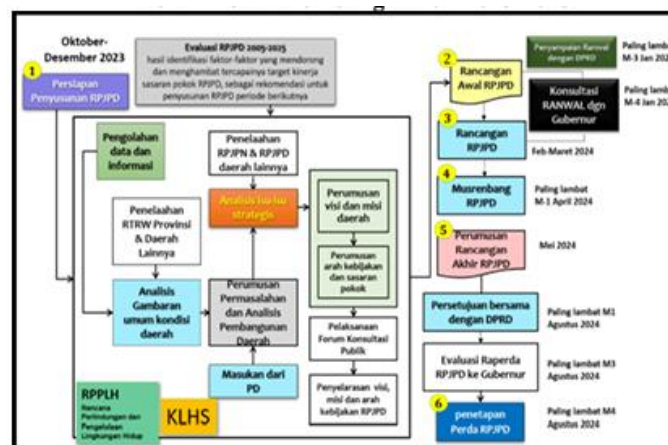
Gambar 1. Pendekatan dalam penyusunan RPJPD Kota Palembang Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Palembang tahun 2025-2045

Selain itu, tahapan penyusunan RPJPD yang ditampilkan pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai regulasi, mulai dari pengumpulan data, perumusan visi-misi, hingga penetapan Perda.

Gambar 2. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Palembang tahun 2025-2045

Kemampuan *thinking ahead* juga terlihat dari upaya Bappeda Litbang dalam mengidentifikasi tantangan masa depan melalui pendekatan *foresight*. Informan A A menyampaikan bahwa arah pembangunan dirancang berdasarkan transformasi ekonomi, sosial, dan kepemimpinan yang selaras dengan misi nasional. Ia menegaskan, *"Perencanaan tidak hanya proyeksi, tetapi membentuk masa depan melalui aksi yang terukur agar target dapat dicapai"* (Wawancara, 19 November 2025). Di sisi lain, E S menjelaskan bahwa Bappeda Litbang memiliki mekanisme adaptif dalam menghadapi perubahan mendadak, khususnya kebijakan mandatori nasional, melalui kesepakatan formal bersama DPR yang menjadi dasar penyesuaian dokumen perubahan RKPDP.

Selanjutnya, penggunaan data strategis menjadi elemen penting dalam mendukung perencanaan yang visioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Litbang menerapkan kerangka Satu Data Indonesia dalam pengumpulan, pengolahan, validasi, dan pemanfaatan data. A A menyatakan bahwa, *"Seluruh data perencanaan harus tervalidasi melalui mekanisme Satu Data, dengan Kominfo sebagai wali data"* (Wawancara, 19 November 2025). Pernyataan ini didukung oleh E S yang menjelaskan peran Bappeda Litbang sebagai sekretariat Forum Satu Data Kota Palembang dan koordinasi lintas OPD, BPS, provinsi, hingga kementerian.

Gambar 3. Portal satu data palembang

Sumber: Satu Data Palembang (2026)

Thinking Again (berpikir kembali)

Penerapan pendekatan *dynamic governance* pada tahapan *thinking again* dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang tercermin melalui praktik evaluasi berkala dan tindakan perbaikan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Litbang. Proses berpikir kembali ini dimaknai sebagai upaya meninjau ulang kebijakan yang telah berjalan, merefleksikan capaian dan kendala, serta menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran untuk penyusunan kebijakan ke depan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, evaluasi perencanaan pembangunan di Kota Palembang dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang, mulai dari evaluasi triwulan, tahunan, hingga evaluasi periodik sesuai dengan siklus dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Sebagaimana disampaikan oleh A A selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kota Palembang, evaluasi dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa, "*Evaluasi kita ada triwulan, 4 kali setahun, ada satu tahun penuh, ada per periode perencanaan, misalnya perencanaan RPJMD 5 tahun, maka setiap 5 tahun kita lakukan evaluasi, 20 tahun untuk RPJPD. Evaluasi menyangkut pada stakeholders, dan pemerintahan terkait... Evaluasi itu itikadnya untuk perbaikan pasti dimanfaatkan untuk perencanaan ke depan.*" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas perencanaan.

Hal senada disampaikan oleh E S selaku Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Palembang, yang menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi utama. Ia menyebutkan bahwa, "*Evaluasinya ada 3, evaluasi realisasi APBD realisasi fisik dan keuangan... evaluasi hasil RKPD... pakai sistem namanya E-Monev... ada juga evaluasi yang terkait dana pusat.*" Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap triwulan dengan melibatkan OPD sebagai pelaksana program, serta memanfaatkan sistem monitoring untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Selain itu, evaluasi terhadap RPJMD dan RPJPD juga dilakukan dengan melibatkan akademisi, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga proses evaluasi bersifat partisipatif dan inklusif.

Hasil evaluasi yang diperoleh selanjutnya ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan perencanaan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan berikutnya. A A menjelaskan bahwa, "*Setiap tahun kita melakukan perubahan perencanaan, namanya perubahan RKPD... RPJMD kita juga pernah melakukan perubahan RPJMD, sebagai bentuk evaluasi sebelumnya, pembelajaran.*" Ia juga menegaskan bahwa penggunaan data capaian dua tahun sebelumnya dalam bentuk *time series* menjadi dasar dalam penyusunan target, sehingga perencanaan tidak dilepaskan dari realitas kinerja sebelumnya. Sejalan dengan itu, E S menyatakan bahwa, "*Hasil evaluasi memang tertera atau selalu dimasukkan di dokumen perencanaan baik RKPD yang tahunan, RPJMD, sama di RPJPD.*" Praktik tersebut menunjukkan bahwa proses *thinking again* dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang dijalankan melalui evaluasi berkelanjutan dan integrasi hasil evaluasi secara nyata ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan.

Thinking Across (berpikir lintas sektor)

Tahap *thinking across* dalam penerapan pendekatan *dynamic governance* pada perencanaan pembangunan di Kota Palembang diwujudkan melalui koordinasi lintas OPD dan keterlibatan stakeholders secara luas. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi lintas OPD menunjukkan pola yang relatif terstruktur melalui forum formal, mekanisme sistem perencanaan terintegrasi, serta peran Bappeda Litbang sebagai simpul koordinasi. A A selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kota Palembang menyampaikan bahwa, "*Memang kita sinergi kolaborasi lintas OPD. Jadi kita melibatkan seluruh stakeholders, bahkan masyarakat, akademisi, media, milenial, disabilitas, dan kelompok marginal. Kita menyusun dokumen terkoordinasi, terintegrasi, by sistem, sistem*

SIPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih karena sudah diatur sesuai tupoksi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor tidak hanya melibatkan OPD, tetapi juga berbagai unsur non-pemerintah sejak tahap awal perencanaan.

Koordinasi tersebut diperkuat melalui rapat koordinasi yang rutin difasilitasi oleh Bappeda Litbang. E S selaku Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang menjelaskan bahwa, *"Ada rapat koordinasi seperti forum satu data Indonesia, kita panggil OPD-OPD dan narasumber dari kementerian. Bappeda ini kan wadah koordinasi, kadang sebulan bisa beberapa kali."* Namun, ia juga mengungkapkan adanya kendala dalam praktik koordinasi, seperti perbedaan perwakilan OPD yang hadir atau ketidakhadiran pejabat yang berkompeten, sehingga informasi perlu disampaikan ulang agar tetap tersambung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme koordinasi telah tersedia, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masing-masing OPD.

Dari sisi OPD teknis, D A selaku Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Palembang menyampaikan bahwa koordinasi dengan Bappeda Litbang berjalan konsisten melalui berbagai forum. Ia menyatakan, *"Dari mulai penyusunan RPJMD, RKPD, sampai program strategis wali kota dan nasional, kami selalu dilibatkan oleh Bappeda. Ada Musrenbang dari kelurahan sampai kota untuk menyerap aspirasi masyarakat."* Hal serupa disampaikan oleh B H selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui Musrenbang, rapat koordinasi, serta pelaporan kinerja seperti E-SAKIP dan LKPD, meskipun terdapat keterbatasan wewenang dan data akibat pembagian urusan dengan pemerintah provinsi.

Selain koordinasi lintas OPD, keterlibatan stakeholders juga menjadi bagian penting dari *thinking across*. A A menjelaskan bahwa Bappeda Litbang membentuk Majelis Kelitbangan dan forum komunikasi publik yang melibatkan akademisi, LSM, organisasi perempuan, pemuda, pelaku ekonomi kreatif, serta kelompok rentan. Ia menyebutkan, *"Masukan dari Musrenbang itu dipertimbangkan, apalagi kalau isu tematik belum tercantum di dokumen, pasti dicantumkan."* Pernyataan ini diperkuat oleh E S yang menyatakan bahwa setiap usulan stakeholders dicatat dalam berita acara dan notulen Musrenbang, kemudian diselaraskan dengan prioritas kebijakan sebelum diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Dari perspektif LSM, S R selaku Ketua Yayasan Intan Maharani Kota Palembang menjelaskan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat tidak hanya sebatas diundang, tetapi juga direspons melalui kebijakan nyata, seperti lahirnya surat edaran wali kota terkait literasi kesehatan dan perlindungan anak, yang berawal dari diskusi dan masukan *stakeholders* dalam forum perencanaan.

Pembahasan

Thinking Ahead (Berpikir ke Depan)

Penerapan *thinking ahead* dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang terlihat dari kemampuan Bappeda Litbang dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada masa depan. Proses perencanaan tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan saat ini, tetapi juga diarahkan untuk mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan datang. Hal ini tercermin dari upaya menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga arah pembangunan Kota Palembang tetap berada dalam satu garis kebijakan pembangunan nasional dan regional.

Selain itu, kemampuan berpikir ke depan juga tampak dari respons Bappeda Litbang terhadap dinamika kebijakan dan perubahan situasi, seperti perubahan regulasi atau kepemimpinan. Penyesuaian dilakukan melalui percepatan penyusunan dokumen, pengaturan ulang jadwal perencanaan, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Pendekatan *foresight* juga diterapkan dengan menetapkan target pembangunan yang berorientasi pada transformasi ekonomi dan sosial, serta didukung oleh penggunaan data strategis melalui kerangka Satu Data yang memastikan perencanaan berbasis informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Thinking Again (Berpikir Kembali)

Prinsip *thinking again* dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang diwujudkan melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkala. Bappeda Litbang melaksanakan evaluasi triwulanan, tahunan, serta evaluasi terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD). Evaluasi tersebut mencakup realisasi APBD, realisasi fisik dan keuangan, pelaksanaan RKPD, serta pengelolaan dana pusat. Proses evaluasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti OPD, Inspektorat, akademisi, dan lembaga masyarakat, serta didukung oleh penggunaan sistem monitoring seperti E-Monev dan SIPD.

Hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi dijadikan dasar utama dalam melakukan perbaikan perencanaan. Tindakan perbaikan diwujudkan melalui perubahan RKPD setiap tahun, penyesuaian RPJMD jika diperlukan, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam seluruh dokumen perencanaan. Penggunaan data capaian tahun sebelumnya sebagai dasar analisis menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan secara berbasis bukti dan pembelajaran, sehingga kebijakan pembangunan bersifat adaptif, reflektif, dan terus disempurnakan sesuai kondisi serta kebutuhan daerah.

Thinking Across (Berpikir Lintas Sektor)

Penerapan *thinking across* dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang tercermin dari kuatnya koordinasi lintas OPD yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang. Koordinasi dilakukan melalui berbagai forum resmi seperti rapat koordinasi, Musrenbang berjenjang, forum konsultasi publik, serta pelaporan terintegrasi melalui sistem SIPD. Melalui mekanisme ini, perencanaan pembangunan tidak bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dengan melibatkan OPD terkait, akademisi, perwakilan masyarakat, dan media. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa ketidakhadiran pejabat yang berkompeten atau perbedaan perwakilan OPD, yang berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi.

Selain koordinasi lintas OPD, keterlibatan *stakeholders* juga menjadi aspek penting dalam *thinking across*. Bappeda Litbang membuka ruang partisipasi luas melalui Musrenbang, forum konsultasi publik, Majelis Kelitbang, serta mekanisme daring. Berbagai unsur seperti LSM, dunia usaha, kelompok pemuda, organisasi perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan kelompok rentan dilibatkan secara aktif. Masukan yang diberikan tidak hanya dihimpun, tetapi dianalisis dan disesuaikan dengan prioritas kebijakan sebelum diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Kota Palembang dijalankan secara kolaboratif dan inklusif untuk menjawab permasalahan pembangunan yang kompleks.

Pendekatan *dynamic governance* yang dilakukan Bappeda Litbang dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang diterapkan secara cukup baik melalui praktik perencanaan yang adaptif, berbasis data, dan kolaboratif. Hal ini tercermin dari kemampuan Bappeda Litbang dalam menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, melakukan antisipasi terhadap tantangan masa depan melalui proyeksi dan tindakan strategis, memanfaatkan data terintegrasi dalam kerangka Satu Data Indonesia, serta menjalankan evaluasi dan perbaikan perencanaan secara berkala. Selain itu, Bappeda Litbang juga berperan sebagai pusat koordinasi lintas OPD dan fasilitator keterlibatan masyarakat, akademisi, dan LSM dalam proses perencanaan. Meskipun masih terdapat kendala teknis dalam koordinasi yang dilakukan, berupa konsistensi kehadiran pejabat berkompeten dalam forum koordinasi. Namun demikian, Bappeda Litbang telah menerapkan prinsip tata kelola yang dinamis dalam merespons perubahan, mengantisipasi tantangan masa depan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam satu arah pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sari & Rusli (2023) yang mengemukakan bahwa penerapan *dynamic governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru diterapkan melalui perencanaan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, evaluasi lintas OPD, serta pembelajaran dari daerah lain, yang sama halnya tercermin dalam penelitian ini melalui praktik perencanaan adaptif oleh Bappeda Litbang Kota Palembang, mekanisme evaluasi berkala lintas OPD, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan, sehingga menunjukkan kesamaan pola tata kelola yang dinamis dan responsif terhadap perubahan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Setiawan & Nawangsari (2023) yang mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan ketiga prinsip *dynamic governance* melalui inovasi program e-Rutilahu, integrasi lintas sektor, serta evaluasi berbasis data dan partisipasi masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada hambatan birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Keselarasan tersebut terlihat dari kesamaan pola tata kelola di mana pemerintah daerah berperan aktif dalam menyusun arah pembangunan jangka panjang, melakukan evaluasi secara berkelanjutan, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *dynamic governance* yang dilakukan Bappeda Litbang dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang telah diterapkan cukup baik. Penerapan *thinking ahead* terlihat dari penyusunan perencanaan yang berjenjang, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta didukung oleh antisipasi perubahan dan pemanfaatan data strategis. *Thinking again* diwujudkan melalui mekanisme evaluasi berkala dan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan perencanaan. *Thinking across* tercermin dalam koordinasi lintas OPD dan keterlibatan *stakeholders* melalui berbagai forum formal untuk menjaga

sinkronisasi program, walaupun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala terkait kehadiran dan keterwakilan dalam forum koordinasi.

Saran

Bappeda Litbang disarankan untuk membangun sistem monitoring kehadiran pimpinan OPD yang terhubung langsung ke *dashboard* Wali Kota. Instrumen digital ini berfungsi memvisualisasikan tingkat kehadiran dan partisipasi aktif pimpinan OPD dalam rapat koordinasi strategis secara real-time yang terintegrasi langsung ke meja Wali Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y. P., & Muftiadi, A. (2023). Prioritas Daerah Pembangunan Menggunakan Indeks Komposit di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(3), 326. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.43267>
- Anggraini, D. (2025). Tata Kelola Pemerintah Yang Belum Efektif. In A. Nadjib, Khairunnas, & R. Rafinzar (Eds.), *Membangun Daya Saing Daerah di Era Globalisasi* (pp. 355–362). IDEA Press Yogyakarta.
- Anggraini, D., Sobri, K. M., Lionardo, A., & Putra, R. (2025). Adaptive Policy Model in Poverty Alleviation in Indonesia. *MIMBAR*, 41(1), 111–122. <https://doi.org/10.29313/mimbar>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota (Km2)*, 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAxIzI=/luas-wilayah.html>
- Bappeda Litbang Kota Palembang. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang Tahun 2025-2045. Pemerintah Kota Palembang.
- Budiyanto, M. N., Fitriani, A., Usulu, E. M., & Handayani, D. N. (2025). *Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi* (1st ed.). Media Penerbit Indonesia.
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gaba, F. V. B., Widiyanto, M. K., & Puspaningtyas, A. (2024). Reformasi Pelayanan Surabaya Single Windows (SSW) Alfa Menggunakan Pendekatan Dynamic Governance di Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(04), 199–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/paob.v4i04.1604>
- Iriani, A., Prabujaya, S. P., Zubaidah, S., & Endasari, E. (2025). Pendekatan Thinking Across dalam Dynamic Governance: Strategi Efektif untuk Mewujudkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 20–41. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4687>
- Jauhariah, & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *Fokus*, 21(1), 213–219. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/737/728>
- Kamila, N. F., Wardana, R. S., Fauzan, R., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 178–190. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5084>
- Kiareni, C. L., Sorisa, C., & Parhusip, J. (2024). Analisis Penerapan Distribusi Sampling terhadap Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna Media Sosial. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 560–564. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.3004>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Word Scientific.
- Nurhayati, N., Kusuma, H., & Rahman, A. (2024). Strategi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik: Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kualitas Relasional. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 12(2), 154–174. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i2.14017>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2025, June 16). *Herman Deru Tegaskan Arah Pembangunan Sumsel 2025–2029*. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumselprov.go.id/detail/berita/herman-deru-tegaskan-arrah-pembangunan-sumsel-2025-2029/baru>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal SARAQ OPAT*, 5(1), 022–031. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat>
- Setiawan, A. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 92–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8176>
- Undang, G. (2024). Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 121–130. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i1.35000>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).